Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto yang memiliki ukuran minimal 250 Kb dan maksimal 2 MB. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Bersama Merawat Indonesia

PERUSAKAN makam bersimbol salib pada TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon (16/6/2021) menghebohkan warga dan membuat geram Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Perusakan tersebut sebenarnya peristiwa kecil, namun berpotensi memiliki implikasi yang luas sehingga pimpinan daerah langsung turun tangan. Perusakan dilakukan oleh anak-anak kecil, warga belajar (santri) kuttab. Narasi yang dikhawatirkan, kuttab mengajarkan intoleransi kepada anak sejak usia dini. Penyemaian paham intoleransi kepada anak didik melalui pendidikan tentu membahayakan eksistensi NKRI.

Kuttab memang memiliki keunikan. Hasil Policy Brief Balitbang Agama Semarang (Sofanudin, dkk 2019) terhadap Implementasi Kuttab di Jawa Tengah menunjukkan dua sisi; kuttab perlu diadopsi sekaligus diawasi. Kuttab merupakan "terobosan" dalam sistem pendidikan, menawarkan sesuatu yang "baru" meskipun sebenarnya "lama". Banyak hal baru yang diterapkan di kuttab. Sesuatu yang baik dari kuttab bisa ditiru dan bahkan diadopsi, tetapi hal yang salah dan keliru perlu dicegah. Pemerintah perlu lebih hadir dalam konteks eksistensi kuttab ini.

Problem Kuttab

Belum ada dalam kamus

Kuttab merupakan inovasi dalam sistem pendidikan. Secara faktual, di masyarakat telah berkembang lembaga pendidikan yang mengusung brand kuttab. Namun, istilah kuttab sendiri belum/tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, istilah kuttab sendiri tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pemerintah (Kemendikbudristem dan/atau Kemenag) tidak/belum memiliki data base jumlah kuttab di Indonesia. Hal ini karena, perijinan kuttab selama beragam, ada yang memiliki ijin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan

tingkat ula di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk (nunut) pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki ijin operasional.

Hemat kami, perijinan kuttab pada dinas pendidikan (PKBM) secara substansi tidak tepat. Dari sisi kurikulum yang diajarkan, kuttab lebih mirip sebagai pendidikan keagamaan Islam. Meskipun secara spesifik, di kementerian agama pun belum tersedia payung hukum. Dari sisi bidang/seksi yang ada di Kementerian Agama kab/kota umumnya terdiri atas: (1) seksi PAIS, yang membidangi pendidikan agama Islam pada sekolah umum, (2) seksi Pendidikan Madrasah, yang mengurus madrasah formal (RA, MI, MTs dan MA) dan (3) Seksi Pondok Pesantren, yang membidangi pondok pesantren, madrasah diniyah, dan Taman Pendidikan al-Quran.

Dilihat dari sejarah, kuttab pernah dikenal pada masa Kesultanan Islam Siak Sri Indrapura, sekitar tahun 1723-1946. Setelah itu, tidak lagi terdengar eksistensi kuttab ini. Perkembangan pesat justru baru dimulai tahun 2012 dengan berdirinya Kuttab Al-Fatih, sebagai kuttab terbesar di Indonesia. Saat ini, berkembang kuttab dengan berbagai nama, salah satunya adalah kuttab yang menggunakan nama: Millah Muhammad yang ada di Surakarta. Secara mudah, semangat kuttab sejatinya ingin mengembalikan atau merestorasi sistem pendidikan Islam.

Kata kuttab atau maktab berasal dari kata dasar ka-ta-ba yang berarti menulis atau tempat belajar menulis. Kuttab atau katib berarti penulis. Kata kuttab adalah bentuk mufrod, sementara bentuk jamaknya adalah kutaib yang berarti para penulis. Pada perkembangannya,

nama kuttab dipakai untuk menyebutkan tempat belajar al-Quran untuk anak-anak. Dalam konteks sekarang, kuttab adalah lembaga pendidikan anak berusia TK/RA dan/atau SD/MI, yakni berusia 5-12 tahun. Kuttab merupakan lembaga pendidikan Islam. Pendirian kuttab lebih didorong oleh motivasi agama, dakwah melalui dunia pendidikan. Dalam batas tertentu, semangat pendirian kuttab sama dengan semangat pendirian pesantren, madrasah maupun sekolah Islam.

Perlu Asosiasi

Kuttab sejatinya memiliki dua problem. Pertama, problem internal. Selama ini standar kuttab belum ada (belum disepakati). Bahkan, di antara sesama pengelola kuttab sendiri pun tidak memiliki kesamaan tentang apa itu kuttab. Sebagai contoh, di Jawa Tengah telah berkembang di berbagai tempat: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung dan sebagainya. Antara satu kuttab dengan kuttab yang lain tidak sama. Sehingga ketika ada orang bertanya apa itu kuttab? Jawabannya berbeda-beda.

Dalam konteks ini, hemat kami perlu ada semacam "asosiasi" kuttab yang berfungsi sebagai lembaga silaturahmi sekaligus untuk menjaga kualitas kuttab. Kuttab perlu membentuk semacam LP Ma'arif pada NU, atau Dikdasmen pada Muhammadiyah ataupun semacam JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) pada sekolah Islam terpadu.

Kedua, problem eksternal dan kebangsaan. Peristiwa kecil, perusakan makam di Solo oleh "santri kuttab" bisa bermakna besar jika dinarasikan bahwa semua kuttab

mengajarkan intoleransi. Kuttab identik dengan penyemaian paham radikal. Padahal, tidak demikian adanya. Penutupan Kuttab Millah Muhammad oleh pemerintah daerah hemat kami pun problematik, karena kuttab itu sendiri tidak memiliki izin, yang artinya tidak pernah ada pembukaan. Atas dasar apa kuttab tersebut dibubarkan?

Butuh payung hukum

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dikenal istilah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk pendidikan keagamaan adalah pesantren (Islam), pasraman; pratama widya, adi widya, madyawa widya, utama widya (Hindu), pesantian (Hindu), pabbajja (Budha), Dhammasekha; Nava, Mula, Muda, Uttama (Budha), Shuyuan (Kong Hu Cu), Sekolah Teologi Kristen: SDTK, SMPK, SMATK, dan sekolah minggu.

Kuttab juga bagian dari pendidikan keagamaan Islam, yang mempersiapkan anak didik menjadi ahli ilmu agama. Oleh karena itu, payung hukum untuk kuttab juga penting dipikirkan. Bahwa yang salah, harus diproses secara hukum itu benar. Tetapi, mengeneralisir semua kuttab sebagai instrumen untuk penyemaian paham radikal juga berlebihan. Justru, pemerintah perlu hadir untuk memberikan payung hukum, agar status hukumnya lebih jelas.

Secara de jure belum ada nomenklatur kuttab, namun de facto di masyarakat telah berkembang secara pesat kuttab dengan berbagai nama. Apakah pemerintah akan membiarkannya? Bukankah lebih baik pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan. Mari bersama merawat Indonesia sesuai tugas fungsi kita masing-masing. Tak terkecuali para pengelola kuttab. (*)

DR AJI SOFANUDIN
SENIOR RESEARCHER BALITBANG
DAN DIKLAT KEMENAG RI

BERSAMA MERAWAT INDONESIA

Oleh: Aji Sofanudin

Perusakan makam bersimbol salib pada TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon (16/6/2021) menghebohkan warga dan membuat geram Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Perusakan tersebut sebenarnya peristiwa kecil, namun berpotensi memiliki implikasi yang luas sehingga pimpinan daerah langsung turun tangan. Perusakan dilakukan oleh anak-anak kecil, warga belajar (santri) kuttab. Narasi yang dikhawatirkan, kuttab mengajarkan intoleransi kepada anak sejak usia dini. Penyemaian paham intoleransi kepada anak didik melalui pendidikan tentu membahayakan eksistensi NKRI.

Kuttab memang memiliki keunikan. Hasil *Policy Brief* Balitbang Agama Semarang (Sofanudin, dkk 2019) terhadap Implementasi Kuttab di Jawa Tengah menunjukkan dua sisi; kuttab perlu diadopsi sekaligus diawasi. Kuttab merupakan “terobosan” dalam sistem pendidikan, menawarkan sesuatu yang “baru” meskipun sebenarnya “lama”. Banyak hal baru yang diterapkan di kuttab. Sesuatu yang baik dari kuttab bisa ditiru dan bahkan diadopsi, tetapi hal yang salah dan keliru perlu dicegah. Pemerintah perlu lebih hadir dalam konteks eksistensi kuttab ini.

Problem Kuttab

Ibarat *start up*, kuttab itu seperti *gojek*, *grab* dan sejenisnya. Kuttab merupakan inovasi dalam sistem pendidikan. Secara faktual, di masyarakat telah berkembang lembaga pendidikan yang mengusung *brand* kuttab. Namun, istilah kuttab sendiri belum/tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, istilah kuttab sendiri tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pemerintah (Kemendikbudristem dan/atau Kemenag) tidak/belum memiliki *data base* jumlah kuttab di Indonesia. Hal ini karena, perijinan kuttab selama beragam, ada yang memiliki ijin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk (nuntut) pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki ijin operasional.

Hemat kami, perijinan kuttab pada dinas pendidikan (PKBM) secara substansi tidak tepat. Dari sisi kurikulum yang diajarkan, kuttab lebih mirip sebagai pendidikan keagamaan Islam. Meskipun secara spesifik, di kementerian agama pun belum tersedia payung hukum. Dari sisi bidang/seksi yang ada di Kementerian Agama kab/kota umumnya terdiri atas: (1) seksi PAIS, yang membidangi pendidikan agama Islam pada sekolah umum, (2) seksi

Pendidikan Madrasah, yang mengurus madrasah formal (RA, MI, MTs dan MA) dan (3) Seksi Pondok Pesantren, yang membidangi pondok pesantren, madrasah diniyah, dan Taman Pendidikan al-Quran.

Dilihat dari sejarah, kuttab pernah dikenal pada masa Kesultanan Islam Siak Sri Indrapura, sekitar tahun 1723-1946. Setelah itu, tidak lagi terdengar eksistensi kuttab ini. Perkembangan pesatnya justru baru dimulai tahun 2012 dengan berdirinya Kuttab Al-Fatih, sebagai kuttab terbesar di Indonesia. Saat ini, berkembang kuttab dengan berbagai nama, salah satunya adalah kuttab yang menggunakan nama: Millah Muhammad yang ada di Surakarta. Secara mudah, semangat kuttab sejatinya ingin mengembalikan atau merestorasi sistem pendidikan Islam.

Kata *kuttab* atau *maktab* berasal dari kata dasar *ka-ta-ba* yang berarti menulis atau tempat belajar menulis. Kuttab atau katib berarti penulis. Kata kuttab adalah bentuk *mufrod*, sementara bentuk jamaknya adalah *kataib* yang berarti para penulis. Pada perkembangannya, nama kuttab dipakai untuk menyebutkan tempat belajar al-Quran untuk anak-anak. Dalam konteks sekarang, kuttab adalah lembaga pendidikan anak berusia TK/RA dan/atau SD/MI, yakni berusia 5-12 tahun. Kuttab merupakan lembaga pendidikan Islam. Pendirian kuttab lebih didorong oleh motivasi agama, dakwah melalui dunia pendidikan. Dalam batas tertentu, semangat pendirian kuttab sama dengan semangat pendirian pesantren, madrasah maupun sekolah Islam.

Kuttab sejatinya memiliki dua problem. Pertama, problem internal. Selama ini standar kuttab belum ada (belum disepakati). Bahkan, di antara sesama pengelola kuttab sendiri pun tidak memiliki kesamaan tentang apa itu kuttab. Sebagai contoh, di Jawa Tengah telah berkembang di berbagai tempat: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung dan sebagainya. Antara satu kuttab dengan kuttab yang lain tidak sama. Sehingga ketika ada orang bertanya apa itu kuttab? Jawabannya berbeda-beda.

Dalam konteks ini, hemat kami perlu ada semacam “asosiasi” kuttab yang berfungsi sebagai lembaga silaturahmi sekaligus untuk menjaga kualitas kuttab. Kuttab perlu membentuk semacam LP Ma’arif pada NU, atau Dikdasmen pada Muhammadiyah ataupun semacam JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) pada sekolah Islam terpadu.

Kedua, problem eksternal dan kebangsaan. Peristiwa kecil, perusakan makam di Solo oleh “santri kuttab” bisa bermakna besar jika dinarasikan bahwa semua kuttab mengajarkan intoleransi. Kuttab identik dengan penyemaian paham radikal. Padahal, tidak demikian adanya. Penutupan Kuttab Millah Muhammad oleh pemerintah daerah hemat kami pun problematik,

karena kuttab itu sendiri tidak memiliki izin, yang artinya tidak pernah ada pembukaan. Atas dasar apa kuttab tersebut dibubarkan?

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dikenal istilah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk pendidikan keagamaan adalah pesantren (Islam), pasraman; pratama widya, adi widya, madyawa widya, utama widya (Hindu), pesantian (Hindu), pabbajja (Budha), Dhammasekha; Nava, Mula, Muda, Uttama (Budha), Shuyuan (Kong Hu Cu), Sekolah Teologi Kristen: SDTK, SMPTK, SMATK, dan sekolah minggu.

Kuttab juga bagian dari pendidikan keagamaan Islam, yang mempersiapkan anak didik menjadi ahli ilmu agama. Oleh karena itu, payung hukum untuk kuttab juga penting dipikirkan. Bahwa yang salah, harus diproses secara hukum itu benar. Tetapi, menggenaralisir semua kuttab sebagai instrumen untuk penyemaian paham radikal juga berlebihan. Justru, pemerintah perlu hadir untuk memberikan payung hukum, agar status hukumnya lebih jelas.

Secara *de jure* belum ada nomenklatur kuttab, namun *de facto* di masyarakat telah berkembang secara pesat kuttab dengan berbagai nama. Apakah pemerintah akan membiarkan? Bukankah lebih baik pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan. Mari bersama merawat Indonesia sesuai tugas fungsi kita masing-masing. Tak terkecuali para pengelola kuttab.

Tribun Jateng, 2 Juli 2021

Dr Aji Sofanudin

Senior Researcher pada Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama RI